

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **V.1 Kesimpulan**

Berdasarkan temuan dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa empat variabel independen yang dianalisis memiliki dampak terhadap TPAK di 34 provinsi Indonesia pada periode 2018-2023. Hasil analisis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

- a. Pendidikan mempunyai pengaruh yang signifikan serta positif terhadap TPAK pada Provinsi di Indonesia tahun 2018 – 2023. Hal ini disebabkan karena pendidikan berfungsi sebagai investasi untuk meningkatkan kualitas manusia. Melalui proses pendidikan, seseorang dapat memperbaiki kualitas diri dengan memperkaya wawasan dan keterampilan yang dimiliki. Semakin berkembang pengetahuan dan keterampilan seseorang, semakin besar kesempatan untuk bergabung dengan dunia kerja.
- b. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan tidak berpengaruh signifikan terhadap TPAK pada Provinsi di Indonesia tahun 2018 – 2023. Hal ini karena banyak sektor yang mengandalkan teknologi dan infrastruktur serta memerlukan tenaga kerja terampil dan tidak menyerap tenaga kerja dengan keterampilan rendah, yang menghambat partisipasi angkatan kerja. Faktor lain seperti distribusi lapangan pekerjaan yang tidak merata dan kurangnya keterampilan juga mempengaruhi terbatasnya dampak pertumbuhan ekonomi terhadap TPAK.
- c. Upah Minimum Provinsi mempunyai pengaruh negatif serta signifikan terhadap TPAK pada Provinsi di Indonesia tahun 2018 – 2023. Karena ketika upah minimum tinggi, perusahaan cenderung mengurangi jumlah pekerja yang dipekerjakan. Hal ini disebabkan oleh biaya TK yang meningkat, menyebabkan perusahaan memilih untuk memperkerjakan lebih sedikit tenaga kerja atau bahkan mengurangi perekrutan tenaga kerja baru. Selain itu, upah minimum yang tinggi dapat mengurangi insentif bagi beberapa kelompok masyarakat untuk bergabung dengan pasar kerja, terutama mereka yang memiliki keterampilan rendah, karena mereka mungkin tidak merasa bisa memenuhi kebutuhan hidup dengan pekerjaan yang tersedia pada upah tersebut.

- d. *Purchasing Manager's Index* tidak berpengaruh signifikan terhadap TPAK pada Provinsi di Indonesia tahun 2018 – 2023. Terjadi karena PMI mencerminkan aktivitas ekonomi yang berkembang, seperti peningkatan produksi di sektor manufaktur dan jasa. Namun, dampaknya terhadap TPAK bisa tidak signifikan. Beberapa sektor yang tumbuh cenderung lebih mengandalkan otomatisasi dan teknologi yang tidak membutuhkan banyak tenaga kerja. Selain itu, kebijakan pasar tenaga kerja dan ketersediaan keterampilan yang sesuai juga memengaruhi partisipasi angkatan kerja, yang membatasi pengaruh PMI terhadap TPAK meskipun ada kecenderungan positif.

## **V.2 Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dijabarkan, berikut ini beberapa rekomendasi saran yang dapat diajukan :

### **V.2.1 Saran Teoritis**

- a. Peneliti mengharapkan agar penelitian selanjutnya dapat melibatkan variabel-variabel yang berbeda serta teori yang beragam, sehingga dapat mengidentifikasi faktor-faktor baru yang memengaruhi partisipasi angkatan kerja.
- b. Penelitiannya selanjutnya diharapkan untuk melakukan analisis TPAK berdasarkan sektor ekonomi, seperti pertanian, industri, dan jasa. Pendekatan ini dapat mengidentifikasi sektor-sektor dengan partisipasi angkatan kerja yang tinggi atau rendah, sehingga dapat menjadi fokus dalam perumusan kebijakan peningkatan TPAK.
- c. Peneliti berharap agar peneliti di masa depan menggunakan data yang lebih komprehensif dengan cakupan wilayah yang lebih sempit, sehingga hasil penelitian dapat memberikan dampak yang lebih signifikan.

### **V.2.2 Saran Praktis**

1. Pemerintah daerah dapat meningkatkan program pelatihan & pendidikan yang relevan dengan kebutuhan pasar TK di masing-masing provinsi. Program ini bisa difokuskan pada keterampilan yang sesuai dengan sektor-sektor yang sedang berkembang, sehingga dapat meningkatkan kesiapan angkatan kerja untuk memenuhi permintaan pasar.

2. Pemerintah diharapkan dapat mempertimbangkan baik kepentingan tenaga kerja maupun pengusaha saat merumuskan kebijakan mengenai upah minimum, dengan tujuan agar kebijakan tersebut memberikan keuntungan bagi kedua pihak tanpa mendatangkan kerugian bagi salah satunya.
3. Perusahaan swasta dapat memperhatikan kebutuhan upah yang sesuai dengan standar pasar dan juga dapat memberikan fasilitas pelatihan dan pengembangan keterampilan yang berkelanjutan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas pekerja dan daya saing tenaga kerja dalam menghadapi perubahan ekonomi dan fluktuasi pasar.
4. Dalam upaya mendukung pertumbuhan ekonomi yang merata, pemerintah dan sektor swasta dapat berkolaborasi dalam merancang kebijakan yang menstimulasi investasi di daerah-daerah dengan potensi ekonomi yang belum tergali secara maksimal. Investasi ini dapat menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan dan mendorong peningkatan TPAK di provinsi tersebut.